



# Silpa APBD Dinilai Wajar

**PONTIANAK** - Persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD Kalimantan Barat 2019 kembali menjadi sorotan kalangan wakil rakyat. Ada yang mengkritisi besaran Silpa tersebut tetapi ada pula yang menilainya wajar. Jumlah Silpa APBD Kalbar 2019 tercatat Rp570 miliar, bukan Rp1,1 triliun sebagaimana perkiraan awal.

"Saya lihat ini hal wajar dan wajib terjadi Silpa. Sebab Gubernur Kalbar, Sutarnidji sudah melakukan penghematan dari beberapa pengeluaran APBD yang dianggap tidak terlalu perlu," kata anggota DPRD Kalbar dari Partai Hanura, Suib melalui siaran pers, Selasa (14/1).

Menurutnya, anggaran penghematan tersebut di antaranya biaya perjalanan dinas yang dikurangi, dan pembelian kendaraan dinas kurang penting yang tidak terlaksana. Penyebab Silpa berikutnya adalah beberapa proyek yang ditunda karena pertimbangan waktu menje-

## KISRUH SISA ANGGARAN

**JUMLAH SILPA' 2019: RP570 MILIAR**

### PENYEBAB SILPA:

Penghematan biaya perjalanan dinas

Pembelian kendaraan dinas yang tidak terlaksana

Penundaan beberapa proyek karena pertimbangan waktu mepet

**PAD melampaui target (103 persen)**



\*) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

lang akhir tahun.

"Keputusan bijak harus diambil Pemprov Kalbar. Jika dipaksakan maka konsekuensinya proyek tidak bisa selesai tepat waktu atau dikerjakan tergesa-gesa.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

# Silpa APBD Dinilai Wajar

Sambungan dari halaman 1

Pastinya, Pemprov Kalbar akan berhadapan dengan aparat hukum terutama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalbar," jelas Anggota Fraksi PKB-Hanura, PKPI dan Perindo ini.

Suib merasa kasihan kepada masyarakat jika kegiatan proyek dipaksakan berjalan. Apalagi proyek itu menyangkut uang negara yang mestinya tidak boleh dilaksanakan serampangan. Pun dana kegiatan yang ditunda tidak akan kemana-mana alias masih utuh dan menjadi Silpa.

"Nah, periode berikut tinggal dilanjutkan kegiatan yang tertunda tersebut. Dalam hal ini tidak ada publik yang dirugikan. Yang penting bagi rakyat dananya tidak hilang.

Kegiatan juga dapat dilanjutkan tahun berikutnya. Sebab dananya masih *ready*," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa penyebab lain munculnya Silpa adalah PAD Kalbar yang melampaui target yakni 103 persen. "Ini luar biasa. Apanya yang salah. Jika tahun tahun sebelumnya memang tak terjadi Silpa tetapi terjadi defisit anggaran sehingga punya utang ke kabupaten/kota se-Kalbar," ungkapnya.

Suib menilai kinerja Gubernur Kalbar dari seluruh sektor sudah berjalan efektif dan sangat hati hati sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada rakyat Kalbar. "PAD sudah meningkat lebih dari target. Utang ke daerah tidak ada dan gubernur berani memangkas anggaran dinas tak efektif. Jadi, bukan sekadar wajar terjadi Silpa tetapi wajib terjadi Silpa. Yang tak wajar jika tidak terjadi Silpa. Ini baru ada yang tak beres dan wajib disorot publik," tukasnya.

Sebelumnya, Silpa dan serapan anggaran yang menurun dibanding tahun lalu sempat disorot wakil rakyat. Kritik misalnya disampaikan Komisi III, Irsan SAg. Ia menyayangkan turunnya serapan APBD. Sebagai solusi, ia menyarankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melaksanakan proses pelelangan proyek lebih awal. "Jangan akhir. Pun kepada OPD diusulkan tidak membuat pekerjaan di akhir tahun. Bisa tergesa-gesa dan berdampak," katanya. (*den*)